

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sektor perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam yang semakin meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat memerlukan bantuan untuk meningkatkan usaha berupa modal dari bank dengan cara kredit. Dimana pihak

bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur.

Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan pendapatan seperti : berdagang, bertani, berternak, dan lain-lain. Namun dalam menjalani usahanya masyarakat membutuhkan modal untuk dapat memulai usaha dan mengembangkannya, sehingga lembaga keuangan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sumber modal untuk dapat menjalankan dan mengembangkan usaha yang dijalankannya. Banyak jenis-jenis kredit yang menawarkan bantuan modal bagi masyarakat, mulai dari bank, lembaga non bank maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Pada dasarnya fungsi pokok kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun tidak sedikit pula pemberian kredit kepada masyarakat tersebut mengalami kendala, dikarenakan bank tidak memberikan pinjaman tanpa jaminan, ini dikarenakan bank ingin menghindari terjadinya kerugian yang dialami bank apabila nasabah yang diberikan kredit menunggak pembayaran ataupun angsuran kredit.

Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman. Dalam pemberian kredit ini, bank harus dapat menanggung resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan untuk

meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman.

Oleh karena itu Bank Rakyat Indonesia turut berperan serta meluncurkan Kredit Usaha Rakyat dengan tujuan berperan serta mengembangkan usaha-usaha kecil dalam pengembangan ekonomi yang khususnya berada di kota Medan. Program ini diluncurkan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi penangguran. Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah juga memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan structural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Program kredit usaha rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang diunjuk oleh pemerintah saja, salah satunya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada sektor usaha, yaitu pertanian, perdagangan, perikanan, Jasa Pendidikan, Pengolahan, dan lain-lain. Kredit usaha rakyat ini

ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. Selain itu pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat.

Berikut ini adalah data tentang jumlah target dan tercapainya penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto tahun 2014 s/d 2016 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Jumlah Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto**

<b>Tahun</b>	<b>Pemberian Kredit Usaha Rakyat Yang Tercapai (Rupiah)</b>	<b>Jumlah Kredit Macet (Rupiah)</b>
2014	Rp.12.698.000.000	Rp. 336.950.000
2015	Rp.13.230.900.000	Rp. 395.150.000
2016	Rp.18.000.000.000	Rp. 541.200.000

**Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto.**

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai pada tahun 2014 s/d 2016 mengalami peningkatan. Terlihat bahwa tahun 2014-2015 pemberian kredit yang tercapai mengalami kenaikan sebesar

4,19% yaitu dari total kredit Rp. 12.698.000.000 menjadi sebesar Rp. 13.230.900.000. Tahun 2015 ke tahun 2016 meningkat sebesar 36,04% yaitu dari total kredit Rp. 13.230.900.000 menjadi sebesar Rp. 18.000.000.000. Namun peningkatan jumlah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tersebut diikuti dengan meningkatnya kredit macet selama tahun 2014 s/d 2016. Dan dapat dilihat dari tabel bahwa jumlah kredit macet dari tahun 2014 s/d 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 336.950.000 dan rasio kredit bermasalah sebesar 2% dari jumlah kredit yang diberikan. Dan pada tahun 2015 jumlah kredit macet sebesar Rp. 395.150.000 dan rasio kredit bermasalah sebesar 2% dari jumlah kredit yang diberikan. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah kredit macet sebesar Rp. Rp. 541.200.000 dan rasio kredit bermasalah sebesar 3% dari jumlah kredit yang diberikan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa pemberian kredit usaha rakyat yang tercapai dan kredit macet mengalami peningkatan setiap tahun, begitu juga dengan persentase kredit macet PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto masih tergolong wajar, hal ini didukung oleh peraturan **“Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan apabila rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) jika lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit”**.

Meskipun kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto masih tergolong wajar, namun bila segera tidak ditanggapi oleh pihak bank maka akan membahayakan kelangsungan usahanya. Sehingga untuk mengetahui adanya suatu kesalahan dalam prosedur pemberian

kredit usaha rakyat maka harus dilakukan evaluasi dan tahap analisis kredit untuk menghindari kredit macet.

Dengan adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya kinerja perusahaan, sehingga diperlukan prosedur pemberian kredit dan dapat dilihat dari tahun 2014-2015 NPL sebesar 2% hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto sudah optimal. Sedangkan pada tahun 2016 NPL sebesar 3% adanya kenaikan sebesar 1% menunjukkan pengawasan yang mengalami penurunan. Maka dalam hal ini diperlukan prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengawasannya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: **“ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN SISTEM PENGAWASANNYA PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK CABANG MEDAN GATOT SUBROTO”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti akan menghadapi masalah. Masalah adalah keadaan yang menyimpang dari apa yang diharapkan, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan. Mengingat luasnya masalah yang timbul, maka pada tahapan pembahasan penulis mencoba menguraikan pokok permasalahan yang mempunyai hubungan dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan sistem pengawasannya

sehingga mendapatkan hasil yang merupakan gambaran yang secara menyeluruh tentang permasalahan yang dimaksud.

Menurut Sumadi Suryabrata:

**Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara *das Sollen* dan *das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.<sup>1</sup>**

Untuk menyelesaikan masalah, diperlukan adanya analisis secara berkesinambungan. Setiap masalah membutuhkan tanggapan dan cara-cara untuk mengatasinya agar dapat melaksanakan operasinya sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan skripsi yang dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gatot Subroto Medan sebagai berikut : **“Bagaimana Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dan Sistem Pengawasannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut Jadongan Sijabat : **“Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan pengetahuan, merupakan tujuan yang bersifat jangka**

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Keduapuluhenam: Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 12.

**panjang karena umumnya tidak terkait secara langsung dengan pemecahan masalah-masalah praktis”.<sup>2</sup>**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengawasannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk Cabang Gatot Subroto Medan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan yaitu :

##### 1. Penulis

Sebagai salah satu syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi, Universitas HKBP Nommensen, dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan teori akuntansi perbankan di bidang pengkreditan khususnya mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengawasannya. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah.

##### 2. Perusahaan

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang diteliti mengenai prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengawasannya. Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto sebagai pertimbangan atau bahan pendukung keputusan.

---

<sup>2</sup> Jadongan Sijabat, **Modul Metodologi Penelitian Akuntansi** : Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 13



### 3. Peneliti Lain

Dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi, dan perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan dan penelitian yang berkaitan dengan judul ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya tempat penukaran uang. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Menurut Kasmir pengertian bank adalah :

**“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.**<sup>3</sup>

Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya kepada masyarakat bisnis, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

---

<sup>3</sup> Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Kesembilan : RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 3

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari pengertian bank dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Dimana sebelum kredit diberikan bank terlebih dulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari saham kota (clearing),

penagihan-penagihan surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), bank garansi, bank notes dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Sedangkan menurut A. Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Dan Perdagangan :

**“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”.**<sup>4</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Bank dibagi menjadi beberapa jenis. Perbedaan jenis bank dapat dilihat dari segi fungsi bank, kepemilikan bank, status, penetapan harga dan tingkatannya.

Adapun jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain :

#### 1. Ditinjau dari Segi Fungsinya

##### a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap lapisan masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersil dan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum

---

<sup>4</sup> Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 2

non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas dari pada bank yang berstatus non devisa. Bank devisa antara lain dapat melaksanakan jasa berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank keluar negeri, sedangkan bank non devisa tidak.

Menurut Hasibuan mengemukakan **“Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”<sup>5</sup>**

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Berbeda dengan bank umum, bank perkreditan rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI).

---

<sup>5</sup> Malayu S.P Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan** , Cetakan Kedelapan: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 36

#### b. Bank Milik Swasta Nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional dan akta pendiriannya didirikan oleh swasta. Serta pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Contoh Bank Milik Swasta Nasional adalah Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Lippo, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Bumi Putra.

#### c. Bank Milik Koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

#### d. Bank Milik Asing

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Contoh bank asing adalah ABN AMRO bank, American Express Bank, Bank of America, Deutsche Bank, Bangkok Bank.

#### e. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh pihak swasta nasional.

### 3. Ditinjau Dari Segi Status

Pembagian jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah

produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status ada 2 yaitu :

a. Bank Devisa

Bank yang berstatus devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing karena keseluruhan misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara.

#### 4. Ditinjau Dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh colonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu Pertama, menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal

dengan istilah *spread based*. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

#### b. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut Hasibuan, **“Bank berdasarkan prinsip syariah (BPS) adalah bank umum syariah (BUS) atau bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-Quran dan Hadis)”**.<sup>6</sup>

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

### 2.1.3 Sumber Dana Bank

Sebagai suatu lembaga keuangan, dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman),

---

<sup>6</sup>**Ibid**, hal.39



bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank memperoleh keuntungan.

Adapun jenis sumber dana bank adalah sebagai berikut :

#### 1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri

Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

##### a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

##### b. Cadangan-cadangan bank

Maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

##### c. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

#### 2. Dana Pinjaman Dari Pihak Luar

Dana ini merupakan pinjaman bank dari lembaga lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan. Sumber dana ini disebut sumber dana

pihak kedua. Biasanya perbankan mencari sumber dana dari lembaga lain karena kesulitan dalam pencairan sumber dana dari modal sendiri dan dana masyarakat.

### 3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga disebut dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank. Karena dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80%-90% dari selueuh dana yang dikelola oleh bank. Dana dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu : giro, deposito, tabungan.

## 2.2 Kredit

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin, kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Dilain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang member pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya.

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara mengemukakan :**“Kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang batas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang”**<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Ismail, **Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua : Prenada Media, Jakarta, 2011, hal. 93

### **2.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Tujuan dan fungsi pemberian kredit antara lain :

#### **1. Tujuan Kredit**

##### **a. Mencari Keuntungan**

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

##### **b. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan demikian, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

##### **c. Membantu Pemerintah**

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik.

Disamping memiliki tujuan pemberian kredit juga memiliki fungsi. Fungsi kredit antara lain :

##### **a. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang**

dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja dirumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kemudian dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk Meningkatkan Peredaran Dan Lalu Lintas Uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

d. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

e. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan itu nasabah yang memperoleh kredit dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

f. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan.

Dalam hal meningkatkan pendapatan, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu masyarakat sekitar pabrik juga dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di pabrik tersebut.

#### g. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara sipenerima kredit dengan sipemberi kredit.

### 2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir jenis kredit antara lain :

#### 1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

##### a. Kredit Investasi

**Kredit Investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.**

##### b. Kredit Modal Kerja

**Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.**

#### 2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

##### a. Kredit Produktif

**Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.**

##### b. Kredit Konsumtif

**Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.**

##### c. Kredit Perdagangan

**Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.**

#### 3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

##### a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

**b. Kredit Jangka Menengah**

Merupakan kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

**c. Kredit Jangka Panjang**

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

**4. Dilihat Dari Segi Jaminan**

**a. Kredit Dengan Jaminan**

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

**b. Kredit Tanpa Jaminan**

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik sicalon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

**5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha**

**a. Kredit Pertanian**

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

**b. Kredit Peternakan**

Merupakan kredit yang diberikn untuk sector peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang,

**c. Kredit Industri**

Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar.

**d. Kredit Pertambangan**

Merupakan Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas.

**e. Kredit Pendidikan**

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun saran dan prasarana pendidikan atau dapat berupa kredit untuk mahasiswa.

**f. Kredit Profesi**

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara

**g. Kredit Perumahan.**

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang

**h. Dan sektor-sektor lainnya.<sup>8</sup>**

---

<sup>8</sup>Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapan: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.109-112

## **2.3 Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

### **2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat**

Kredit Usaha Rakyat, yang disingkat KUR, adalah kredit pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari bank. KUR merupakan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Sasaran KUR adalah dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan.

Kredit Usaha Rakyat terbagi dua yaitu Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang di harapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha antara lain: sektor pertanian, perdagangan, perikanan, jasa pendidikan, pengolahan, dan lain-lain dalam arti seluas-luasnya dalam bentuk perorangan/keompok/badan usaha, yang pemberiannya dijamin oleh lembaga penjamin dan imbal jasa penjaminnya dibayarkan oleh pemerintah. KUR terdiri dua bagian yaitu KUR mikro adalah KUR yang memiliki plafond Rp.0 s/d Rp. 25.000.000 dan KUR ritel yaitu KUR yang memiliki plafond Rp.25.000.000 s/d Rp.500.000.000. Tujuan akhir diluncurkan program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.dan manfaat adanya KUR ialah agar

perputaran ekonomi daerah bisa meningkat. Ada enam bank yang menjadi penyalur KUR termasuk Mikro yaitu bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Mandiri serta Bank Bukopin.

### **2.3.2 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat**

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebesar 9% pertahun, dan kalau dirata-ratakan perbulan adalah 0,41%. Kredit Usaha Rakyat Adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) yang ada di Indonesia.

### **2.3.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat**

UMKM yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan ketentuan :

1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/ Pembiayaan diajukan dan belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah.
2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) penjamin KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.



3. KUR yang diperjanjikan antara bank pelaksana dengan UMKM yang bersangkutan.

KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :

1. Untuk kredit modal kerja jangka waktu pengembalian maksimal empat tahun
2. Untuk kredit investasi jangka waktu pengembalian maksimal lima tahun
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### **2.3.4 Peranan Kredit Usaha Rakyat**

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan peranan Kredit Usaha Rakyat terhadap pengembangan UMKM diharapkan mampu mengembangkan usaha-usaha yang ada pada masyarakat. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ialah yaitu :

1. Mempercepat pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
2. Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM kepada Lembaga Keuangan
3. Sebagai upaya penanggulangan/ pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa peranan KUR terhadap pengembangan UMKM agar dapat membantu pemberdayaan dan mengembangkan usaha usaha yang ada pada masyarakat yang tergolong pada

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian yang ada pada masyarakat dimana diharapkan dapat menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan apabila usaha-usaha yang ada pada masyarakat ini berkembang, maka akan dapat membantu mengembangkan usaha usaha yang ada pada masyarakat yang dimana seiring perkembangan usaha-usaha tersebut akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga pengangguran dapat berkurang. Melalui KUR juga diharapkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah juga dapat terbantu memperoleh modal dengan mudah, dan dengan suku bunga yang relative rendah bila dibandingkan dengan suku bunga kredit lainnya, yang dimana KUR ini merupakan Program Pemerintah yang diperuntukkan bagi UMKM yang dinilai layak memperoleh Kredit Usaha Rakyat.

#### **2.4 Prosedur Pemberian Kredit**

Mulyadi mengemukakan :

**“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.**<sup>9</sup>

Maksudnya adalah prosedur merupakan suatu rangkaian tata cara yang diterapkan guna menyelaraskan alur kinerja yang bertujuan untuk pencapaian hasil maksimal.

Prosedur pemberian kredit merupakan suatu tahap yang harus dilalui sebelum kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai suatu kelayakan permohonan kredit. Prosedur

---

<sup>9</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat, Cetakan Kedua : Salemba Empat, Jakarta, 2016, hal.4

pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain selalu berbeda. Yang menjadi perbedaannya adalah hanya terletak dari berbagai cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Adapun prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Permohonan kredit merupakan tahap awal yang diajukan secara tertulis. Dalam tahapan ini, calon nasabah harus menyerahkan surat permohonan kredit. Surat ini harus lengkap sesuai dengan jumlah kredit yang diminta dan tujuan penggunaannya, lalu ditandatangani oleh calon nasabah dan diberi tanggal.

#### 2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi

Yaitu tahap dimana Bank memberikan permohonan yang diajukan oleh calon nasabah debitur serta project proposalnya (bila ada). Data merupakan kumpulan dari informasi mengenai identitas dari nasabah. Dalam tahap ini, nasabah harus melengkapi berupa data atau syarat dari calon debitur yaitu:

- a. Individu, yaitu informasi identitas berupa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga.
- b. Kelompok, yaitu surat pengukuhan dari instansi terkait atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau Akta Notaris.
- c. Koperasi, yaitu anggran dasar beserta perubahannya.
- d. Badan Usaha Lainnya, yaitu akte pendirian beserta pertumbuhannya.

#### 3. Tahap Analisa Kredit

Yaitu tahap dimana pihak bank melakukan analisis terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut. Analisis kredit merupakan proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya analisis tersebut, dapat memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah bagi bank. Menurut Kasmir, ada beberapa formula penilaian kredit yang lazim digunakan yaitu :

a. Penilaian 7P yang terdiri dari :

- 1. Personality**
- 2. Party**
- 3. Purpose**
- 4. Prospect**
- 5. Payment**
- 6. Profitability**
- 7. Protection**<sup>10</sup>

### **1. Personality**

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk mengklasifikasikan nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

### **2. Party**

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank.

### **3. Purpose**

---

<sup>10</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.93-94

Merupakan penilaian yang dilakukan oleh bank mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, misalnya apakah kredit tersebut untuk modal kerja atau investasi dan sebagainya.

#### ***4. Prospect***

Merupakan pinjaman yang dilakukan dengan menilai usaha nasabah dimana yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

#### ***5. Payment***

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit tersebut. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah, maka akan semakin baik.

#### ***6. Profitability***

Merupakan penilaian yang dilakukan bank untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

#### ***7. Protection***

Tujuan dari protection adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. Apabila usaha nasabah pailit, maka upaya untuk mengatasi masalah tersebut bank tidak perlu khawatir karena jaminan yang diberikan nasabah memiliki perlindungan.

b. Penilaian 5C terdiri dari :

- 1. Character*
- 2. Capacity*
- 3. Capital*
- 4. Collateral*
- 5. Condition*<sup>11</sup>

### **1. Character**

Character merupakan sifat atau watak seseorang calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

### **2. Capacity**

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

### **3. Capital**

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

### **4. Collateral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

---

<sup>11</sup>Ibid, hal.91-92

### **5. Condition**

Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

#### **4. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit**

Yaitu tahap dimana dilaksanakan pemberian keputusan terhadap hasil analisis kredit, apakah disetujui atau ditolak. Biasanya keputusan kredit dilakukan oleh direktur atau pejabat tertentu yang telah diberi wewenang. Jika bank memutuskan atau meluluskan permohonan kredit maka perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan calon debitur.

Disamping perjanjian kredit, salah satu yang paling penting dan yang wajib dikumpulkan serta diteliti adalah surat tanda bukti kepemilikan barang jaminan. Dalam hal ini, penelitian surat bukti kepemilikan barang jamina mencakup hal-hal berikut : keabsahan dan keaslian surat tanda bukti kepemilikan harta, kecocokan informasi yang tercantum dalam surat tanda bukti dan keadaan fisik harta yang dijamin. Sebagai contoh batas-batas tanah yang tercantum dalam sertifikat tanah dan hasil penelitian lapangan, surat kepemilikan harta jaminan dan kepastian bahwa harta tersebut tidak sedang dijamin kepada pihak ketiga, dan transaksi harta jaminan sesuai dengan harta pasar maupun perkiraan harga jika perusahaan dinyatakan pailit.

#### 5. Tahap Pencairan Kredit

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu: sekaligus atau bertahap. Setelah kelengkapan permohonan kredit dipenuhi dengan lengkap dan jaminan yang diberikan oleh calon debitur telah sesuai dengan diungkapkan, maka diterbitkan surat promes yang merupakan dokumen utama dalam pencairan kredit. Promes ini berisi surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh debitur, dimana debitur berjanji akan membayar pihak bank dengan sejumlah uang tertentu dan dengan jangka waktu tertentu.

#### 6. Tahap Penyelesaian Administrasi Kredit

Administrasi kredit merupakan suatu rangkaian kegiatan dan komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis dalam proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan suatu bank. Pada tahap ini, nasabah telah dapat menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan yang disetujui dan tercantum dalam akte perjanjian kredit.

#### 7. Tahap Pengawasan Kredit

Yaitu tahap dimana bank harus secara aktif melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah debitur, agar kredit yang diberikan itu tidak disalahgunakan.

#### 8. Tahap Pelunasan Kredit

Pelunasan kredit merupakan suatu keadaan dipenuhinya semua kewajiban atau utang nasabah terhadap bank yang berkaitan terhapusnya ikatan perjanjian kredit antara nasabah dengan bank. Setelah kredit dilunasi nasabah, maka bank



harus menyusun laporan pelunasan kredit, menghentikan perjanjian penjaminan kredit dan menutupi arsip portofolio kredit yang bersangkutan.

## **2.5 Sistem Pengawasan Kredit**

### **2.5.1 Pengertian dan Tujuan Sistem Pengawasan Kredit**

Menurut Seprida Hanum Harahap mengemukakan:

**“Sebuah sistem merupakan suatu rangkaian dan jaringan kerja yang saling terhubung dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikannya”.**<sup>12</sup>

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi.

Pengawasan merupakan suatu perbandingan antara pelaksanaan dan realisasi dengan rencana yang telah ditetapkan semula. Pengawasan kredit berarti tindakan pemantauan untuk mengetahui apakah kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi apabila terjadi indikasi ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan setelah kredit yang dicairkan merupakan kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit

---

<sup>12</sup>Seprida Hanum Harahap, Wahyudi, Surya Sanjaya, **Sistem Informasi Akuntansi**, Cetakan Pertama : Citapustaka Media, Bandung, 2015, hal. 2

bermasalah atau kredit macet) terutama disebabkan oleh kelalaian lembaga kredit dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif.

Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit yang dapat berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkreditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan feedback agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.

### **2.5.2 Teknik Pengawasan Kredit**

Teknik pengawasan kredit terdiri dari :

#### *1. Control by Exception*

Hal yang bersifat exception dapat diketahui dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisa SWOT), sehingga demikian sasaran intensitas pengawasan difokuskan pada hal-hal yang lemah (faktor-faktor intern) dan hal-hal yang menjadi ancaman/membahayakan (faktor ekstren).

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor yaitu :

- a. Kekuatan (*strenghtness*) merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis sendiri.
- b. Kelemahan (*wealness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

c. Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri misalnya, competitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar.

d. Ancaman (*threats*) merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

## 2. Pengawasan fisik

Pengawasan fisik adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat usaha nasabah.

## 3. Monitoring pengawasan perkreditan

Pelaksanaan pengawasan kredit harus mengumpulkan data-data dan informasi ekstern laporan akuntan bmaupun informasi intern yang berupa mutasi rekening Koran debitur yang bersangkutan.

## 4. Audit

Kegiatan audit mencakup tiga bidang sebagai berikut :

### a. *Financial Audit*

Menguji tingkat kewajaran, kecermatan dan kebenaran data keuangan untuk memberikan data perlindungan atas keamanan harta perusahaan, melakukan evaluasi atas kelayakan internal apabila telah memadai.

### b. *Operasional audit*

Suatu kegiatan yang sistematis dilakukan oleh internal auditor secara independen dan berorientasi untuk masa yang akan datang atas semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi, baik dalam tingkat *top management*, *middle*

*management, lower management*, dengan tujuan mengadakan perbaikan rencana kerja usaha atau pencapaian tersendiri dan meningkatkan manfaat-manfaat yang diminati oleh masyarakat sekeliling serta pengembangan pada tugas.

*c. Management audit*

Suatu penilaian yang dilakukan secara sistematis dan independen serta berorientasi pada masa mendatang atas semua kegiatan yang dilaksanakan manajemen.

### **2.5.3 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit erat kaitannya dengan kelancaran pengembalian kredit, oleh karena itu penyelenggaraan kredit tersebut perlu mendapat pengawasan yang baik. Pengawasan kredit pada dasarnya merupakan suatu proses berkelanjutan yang dimulai sejak perencanaan kredit, proses pemberian kredit hingga pengawasan setelah kredit tersebut diberikan. Bentuk pelaksanaan pengawasan kredit dibagi menjadi dua, diantaranya :

1. *Preventive Control of Credit*

adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. *Preventive Control of Credit* dilakukan dengan cara :

a. Penetapan Plafond Kredit

Plafond kredit atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit (L3) adalah batas maksimum kredit diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus ditetapkan dan

disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan.

#### b. Pemantauan Debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan usaha debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.

#### c. Pembinaan Debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar debitur lebih mampu mengelola usahanya sehingga usahanya tidak mengalami kolaps. Karena jika usahanya maju dan lancar maka pembayaran kredit akan lancar.

Apabila plafond kredit ditetapkan secara baik dan benar maka kredit diharapkan lancar karena jika kredit macet akan tetap dapat ditarik dengan cara menjual jaminan/agunan yang telah ada dalam perjanjian sebelumnya.

### 2. *Repressive Control of Credit*

*Repressive control of credit* adalah tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara :

#### a. *Rescheduling*

##### 1. Memperpanjang jangka waktu kredit

Debitur diberi perpanjangan waktu dalam pengembalian kredit

##### 2. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Debitur diberi perpanjangan waktu yang diiringi dengan mengecilnya jumlah angsuran dalam setiap pengembalian. Misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 1 bulan, kemudian menjadi 3 bulan.

3. Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

*b. Reconditioning*

Diadakannya perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian kredit, seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.

2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, yaitu bunga tetap dihitung tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai kesanggupan atas bunga yang terutang tersebut tidak dikenakan bunga dan tidak menambah plafond kredit.

3. Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu. Cara ini ditempuh jika hasil operasi nasabah memang menunjukkan laba memungkinkan untuk membayar bunga.

4. Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali pokok.

*c. Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. *Liquidation*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usahanya nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Penulisan skripsi ini melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian yaitu Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat dan Sistem Pengawasannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto No. 126 BA-BB.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata **“Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian”**.<sup>13</sup>

#### 3.3 Sumber Data

##### 1. Data Sekunder

Menurut Danang Sunyoto **“Data sekunder adalah data yang bersumber dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan obyek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistik (BPS)”**.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sumadi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluh Satu : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 76

<sup>14</sup> Danang Sunyoto, **Metodologi Penelitian Akuntansi**, Cetakan Pertama : Refika Aditama, Yogyakarta, 2013, hal. 21



Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung yang digunakan, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, prosedur pemberian kredit usaha rakyat, dan sistem pengawasan yang diambil dari perusahaan.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan teknik pengumpulan agar uraian dan analisis dapat dilakukan dengan baik. Untuk memperoleh data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini, ada tiga teknik yang digunakan, yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Gatot Subroto.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan sistem pengawasannya.
3. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber dari literatur, artikel, majalah, buku-buku dan bahan-bahan tulisan, dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.